

SKRIPSI

**PENGARUH PENGANGGURAN TERBUKA DAN UPAH
MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN
DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**HARIS AMANDA
NIM. 150604086**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Haris Amanda
NIM : 150604086
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam peulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-aniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Februari 2021
Yang Menyatakan,

Haris Amanda



**LEMBARAN PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:

**Pengaruh Pengangguran Terbuka Dan Upah Minimum Terhadap
Kemiskinan Di Provinsi Aceh**

Disusun Oleh :

Haris Amanda
NIM. 150604086

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry

Pembimbing I,



Dr. Idaryani, SE., M.Si
NIDN. 0105057503

Pembimbing II



Safnina Sukma, SE., M.Si
NIP. 198708102019032013

Mengetahui Ketua
Program Studi Ilmu Ekonomi 

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Haris Amanda
NIM : 150604086
Fakultas/Program Studi : Ilmu Ekonomi
E-mail : harisamanda1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi
yang berjudul:

Pengaruh Pengangguran Terbuka Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal: 15 Desember 2020

Mengetahui :

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II


Haris Amanda
NIM. 15060408


Dr. Idaryani, SE.,M.Si
NIDN. 0105057503


Safnina Spkma, SE.,M.Si
NIP. 198708102019032013

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengangguran Terbuka Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua program studi Ilmu Ekonomi dan Marwiyati, SE., M.M selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Muhammad Arifin, PH. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan bantuan, dukungan dan masukan yang penulis butuhkan selama ini.
4. Dr. Idaryani, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing I dan Safnina Sukma, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku penguji I dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku penguji II, terimakasih telah memberikan masukan dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Marwiyati, SE., MM. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) terimakasih atas bimbingannya selama ini, serta seluruh Dosen dan Staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis

selama menempuh pendidikan program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.

7. Ungkapan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda Samsul Bahri dan Almarhumah Ibunda Masriati yang memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tiada hentinya.
8. Seluruh keluarga besar yang telah mendoakan, serta sahabat terbaik yang selalu ada baik dari keluarga Ilmu Ekonomi angkatan 2015 serta keluarga besar KSR PMI Unit 02 UIN Ar-Raniry.
9. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran maupun kritikan yang bersifat konstruktif demi kelancaran skripsi ini.

Banda Aceh, 25 September 2021
Penulis,

Haris Amanda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ث	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Sh	29	ي	Y
15	ض	Dh			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
◌َ وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

AR - RANIRY

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Haris Amanda
NIM : 150604086
Fakultas/Pogram Studi : Ekonomi dan Bisnis/Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Pengangguran Terbuka Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh
Tanggal Sidang : 3 Februari 2021
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Idaryani, SE., M.Si
Pembimbing II : Safnina Sukma, SE., M.Si
Kata Kunci : Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Kemiskinan

Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan negara sedang berkembang salah satunya Indonesia. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai dimana semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *Software* SPSS. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel bahwa tingkat pengangguran terbuka (X_1) dan upah minimum (X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2009-2019. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat mendorong terciptanya lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

DAFTAR TABEL

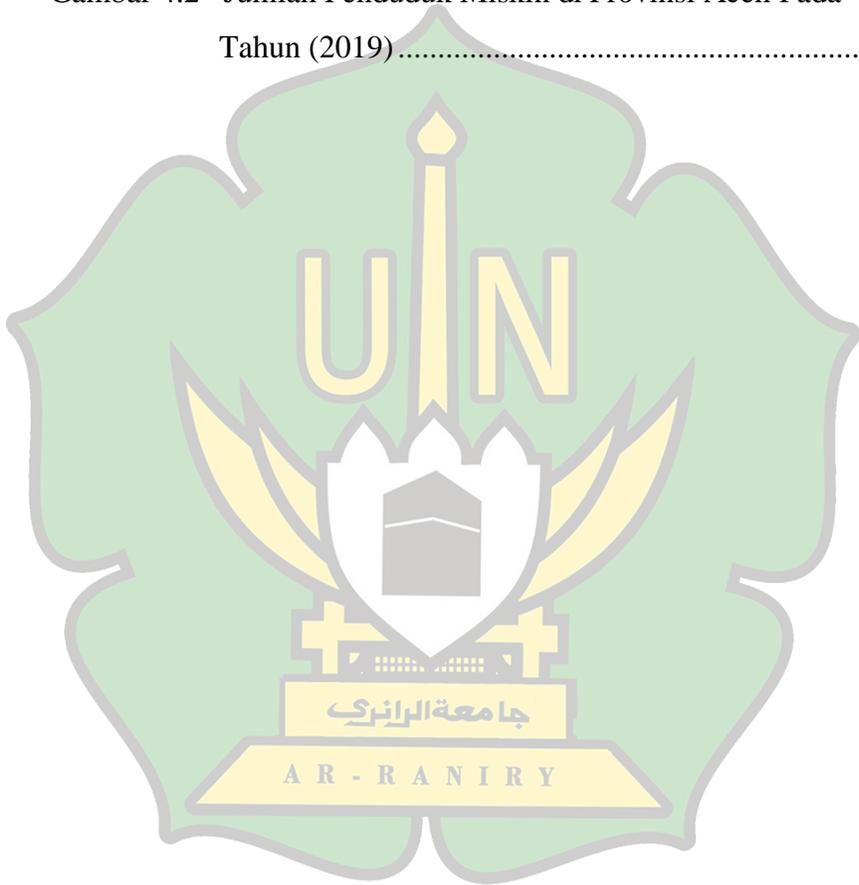
Tabel 1.1	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia pada Tahun 2009-2019	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, dan Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh pada Tahun 2009-2019	5
Tabel 1.3	Jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Aceh pada Tahun 2009-2019	8
Tabel 2.1	Penelitian Terkait	36
Tabel 4.1	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	64
Tabel 4.2	Hasil Uji Multikolinearitas Data	65
Tabel 4.3	Uji <i>Glejser</i>	66
Tabel 4.4	Hasil uji <i>Durbin-Watson</i>	67
Tabel 4.6	Hasil Analisis Uji t	68
Tabel 4.7	Hasil Analisis Uji F	70
Tabel 4.8	Hasil Koefisien Kolerasi dan Diterminasi	71

جامعة الرانيري

AR - R A N I R Y

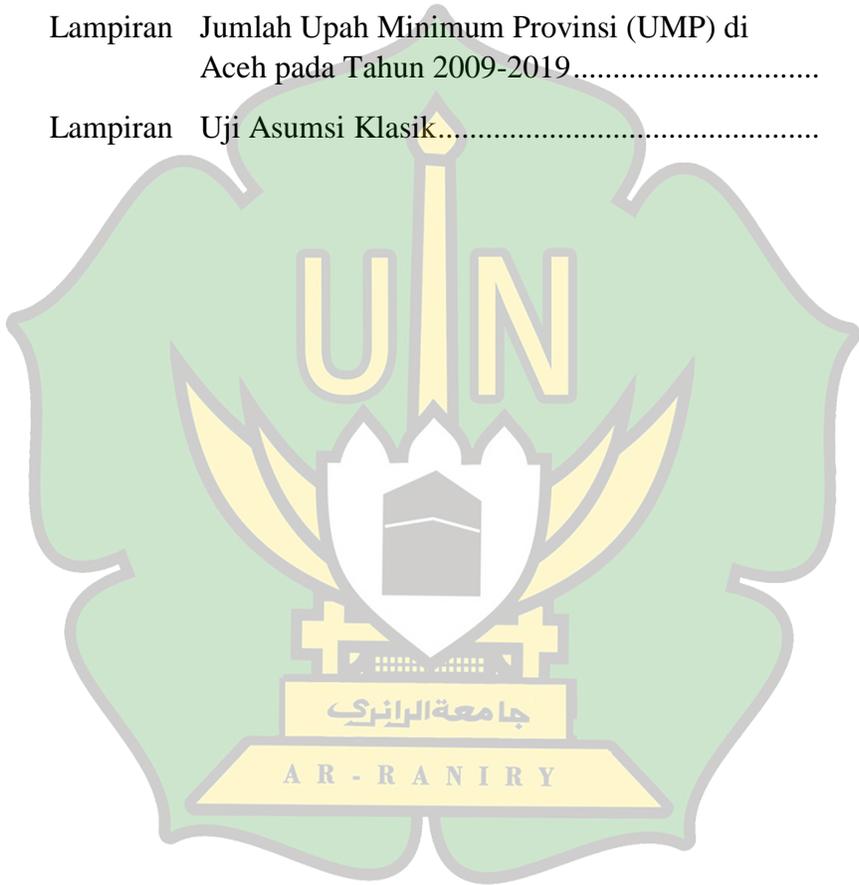
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Skema Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4.1	Penduduk Miskin di Indonesia Pada Tahun (2019)..	57
Gambar 4.2	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Pada Tahun (2019)	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, dan Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh pada Tahun 2009-2019.....	5
Lampiran	Jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Aceh pada Tahun 2009-2019.....	8
Lampiran	Uji Asumsi Klasik.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia perkonomian saat ini membuat negara saling membutuhkan antar negara satu dengan negara lain sehingga menciptakan persaingan serta tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara baik itu dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun teknologi. Sebuah negara maju dan negara berkembang juga mengandung resiko terhadap masa depan perekonomian di sebuah negara sehingga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi di defenisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Basri, 2010)

Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan negara sedang berkembang salah satunya Indonesia. Secara umum, pada periode 2009-2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada tahun 2013 dan 2015. Kenaikkan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2009- 2019 disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Pada
Tahun 2009-2019

Tahun	Juta	Persentase
2009	32.53	14,15
2010	31.02	13,33
2011	30.01	12,49
2012	28.71	11,66
2013	28.60	11,47
2014	27.73	10,96
2015	28.51	11,13
2016	27.76	10,70
2017	26.58	10,12
2018	25.67	9,66
2019	24.79	9,22

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (2020).

Pada September 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 24,79 juta jiwa. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah penduduk miskin juga menurun sebanyak 25,67 juta

jiwa dari tahun 2009 sebesar 32.53 juta jiwa. Persentase penduduk miskin terus menurun tercatat sebesar 924.79 juta jiwa atau menurun sebesar 9,22 persen pada 2019 dari tahun 2018. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2019–September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 137 ribu jiwa, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 221,8 ribu jiwa. Persentase kemiskinan di kota turun dari 6,69 persen menjadi 6,56 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 12,85 persen menjadi 12,60 persen (BPS, 2019).

Penyebab lain dari kemiskinan suatu negara dipengaruhi oleh pengangguran yang merupakan salah satu penentu akan kemakmuran masyarakat yang terdiri dari jumlah penduduk dan tingkat pendapatan. Apabila di suatu negara jumlah penduduknya lebih banyak sedangkan lapangan kerja sedikit disertai pendapatannya rendah tentu akan mengalami tidak seimbang. Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif untuk mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (BPS, 2019).

Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat dan itu akan mengurangi tingkat

kemakmuran yang telah dicapai dimana semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dimana tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran (Sukirno, 2006)

Masalah pengangguran terjadi karena tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat namun pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat. Besarnya tingkat pengangguran mencerminkan bahwa kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001). Namun upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan merupakan hal yang penting. Jika masyarakat tidak menganggur berarti masyarakat tersebut mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan. Dengan penghasilan yang dimiliki maka diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kebutuhan hidup terpenuhi maka tidak akan ada masyarakat miskin. Tingkat pengangguran yang rendah dengan kesempatan kerja yang ada tinggi, maka tingkat kemiskinan akan menjadi rendah. Perkembangan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh tahun 2009-2019 disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, dan Jumlah
Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh Pada Tahun 2009-
2019

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin (%)	Jumlah Pengangguran (terbuka) (ribu)	Persentase Pengangguran Terbuka (%)
2009	4.363.477	885.79	21,8	1.898	8,71
2010	4.523.144	897.5	20,98	1.939	8,37
2011	4.619.033	900.19	19,57	2.001	7,43
2012	4.715.108	876.55	17,6	2.088	9,1
2013	4.811.113	843.379	17,6	2.122	10,3
2014	4.906.835	837.3	18,05	2.123	9,02
2015	5.001.953	851.58	17,8	2.183	9,93
2016	5.096.248	848.44	16,73	2.258	7,57
2017	5.189.466	872.61	16,89	2.289	6,57
2018	5.281.314	839.49	15,97	2.353	6,35
2019	5.371.532	819.44	15,32	2.366	6,20

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Keadaan Ketenagakerjaan (2020).

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada tahun 2009 sebesar 885.79 jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 1.898 jiwa. Jumlah kemiskinan tersebut sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2009-2011 sebesar 900.19 jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 2.001 jiwa. Pada tahun 2012-2014 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 876.55-837.30 jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 2.088-2.123 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 851.58 jiwa dan di tahun 2016 jumlah penduduk miskin kembali menurun sebesar 848.44 jiwa, sampai dengan

tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 872.61 jiwa serta jumlah pengangguran terbuka sebesar 2.289 jiwa. Pada tahun 2018-2019 jumlah penduduk miskin mulai mengalami penurunan sebesar 839.49-819.44 jiwa dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 2.353-2.366 jiwa (BPS, 2019).

Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh (Sumarsono, 2003).

Menurut Undang Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30 "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan." Berdasarkan pengertian diatas, upah adalah balas jasa yang adil dan layak yang menjadi hak seluruh pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan dalam bentuk finansial yang telah disepakati dalam suatu perjanjian kerja.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Menurut UU No. 13/2003. Upah minimum diarahkan pada pencapaian kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan dengan menghitung kebutuhan dasar seperti: pangan, sandang, dan perumahan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi (Riva, 2014).

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan upah minimum yang tinggi. Ini menjadi salah satu daya tarik para pencari kerja dari luar provinsi masuk dan bergabung dalam pasar tenaga kerja di Provinsi Aceh. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan upah minimum di suatu daerah akan berdampak terhadap peningkatan upah rata-rata buruh di Provinsi Aceh. Semakin tinggi peningkatan upah minimum, semakin rendah tingkat kemiskinan di Aceh.

Tabel 1.3
Jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Aceh Pada Tahun
2009-2019
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Upah Minimum Provinsi (Rp)	Pertumbuhan (persen)
2009	1.300.000	-
2010	1.350.000	3,85
2011	1.380.000	2,22
2012	1.400.000	1,45
2013	1.550.000	10,71
2014	1.750.000	12,90
2015	1.900.000	8,57
2016	2.118.000	11,5
2017	2.500.000	8,25
2018	2.700.000	8,71
2019	2.916.810	8,03

Sumber: BPS, Jumlah Upah Minimum Provinsi Aceh (2020).

Pada tabel 1.3 dapat diuraikan bahwa, tingkat upah minimum di Provinsi Aceh meningkat dari tahun 2009-2019 sebesar Rp. 1.300.000,- dan menjadi Rp. 2.916.810,-. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Aceh mengambil langkah kebijakan yang tepat untuk mengurangi pengangguran dan kesejahteraan yang memicu pada menurunnya angka kemiskinan Provinsi Aceh. Dengan tingkat upah minimum yang meningkat setiap tahunnya, hanya sebagian saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Terbukti dari masih meningkatnya angka kemiskinan dan angka

pengangguran yang masih tinggi. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang melekat dan sulit untuk ditanggulangi. Upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan tentu harus ditanggulangi dari dasar seperti, menaikkan upah minimum dan perluasan kesempatan kerja sehingga masyarakat mampu mencukupi kebutuhan pokoknya (BPS, 2019).

Penelitian tentang pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan telah dilakukan oleh Riva (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau” Penelitiannya menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *SPSS for Windows versi 17.0*. Penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang positif antara jumlah pengangguran terbuka dan upah minimum Provinsi secara bersama-sama mempengaruhi tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau yang didasarkan pada koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,840. Hal ini berarti 84% jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh jumlah pengangguran terbuka dan upah minimum Provinsi (Riva, 2014).

Indrawati (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran, dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah di antaranya PDRB per kapita,

pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan upah minimum. Data yang digunakan antara lain PDRB per kapita, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian dilakukan dengan objek 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2010 – 2015 menggunakan data panel dengan metode *random effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB per kapita, kesehatan, dan upah minimum masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan variabel pendidikan dan pengangguran tidak signifikan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan (Indrawati, 2018).

Fitriani (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh 2005-2015.” Penelitiannya menggunakan analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi (R), koefisien determinansi (R^2 Adjusted), uji t dan uji F. Perhitungannya menggunakan *Software Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Penelitiannya menyimpulkan bahwa upah minimum Provinsi dan pengangguran secara bersama-sama (serempak) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2005-2015.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul **“Pengaruh Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Seberapa besar pengaruh pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
3. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini ada dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi pada khususnya dan mahasiswa

lain pada umumnya, yang berminat meneliti lebih lanjut tentang pengaruh pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan penulis dan pembaca tentang pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan Informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menambah dan referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa yang akan datang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

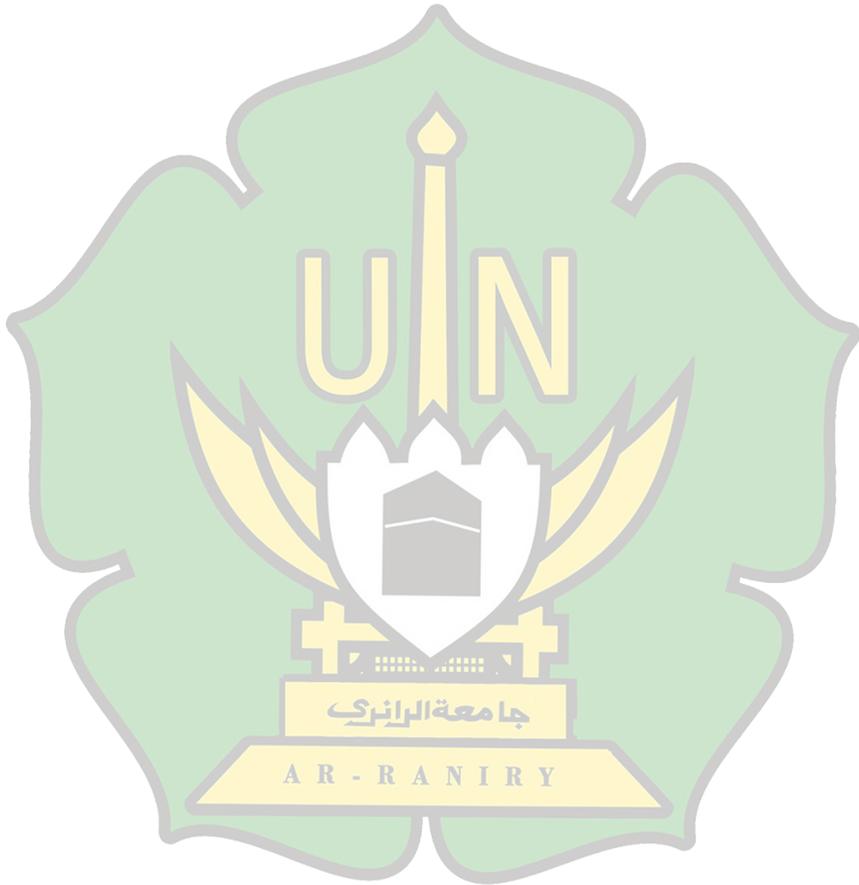
BAB I : Pada bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :Pada bab ini menjelaskan pengangguran, jenis-jenis pengangguran, masalah pengangguran, dampak Pengangguran, pertumbuhan ekonomi, upah, sistem pengupahan di Indonesia, kemiskinan, indikator kemiskinan, ukuran kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, hubungan upah minimum dengan tingkat kemiskinan, hubungan pengangguran dengan tingkat kemiskinan, hasil penelitian terkait 10, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III :Pada bab ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, defenisi operasional variabel, analisis linier berganda, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji hipotesis, uji secara parsial (uji t), uji secara simultan (uji F), analisi korelasi (R) dan analisis koefisien determinasi (R^2).

BAB IV :Bagian ini merupakan laporan dari hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan landasan teori.

BAB V :Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan data penelitian,



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengangguran

2.1.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran dibedakan dalam dua pengertian pengangguran terselubung atau tersembunyi pengangguran musiman. Pengangguran terselubung atau tersembunyi biasanya diartikan sebagai golongan tenaga kerja yang produktivitas marjinalnya adalah nol atau sangat rendah, sehingga walaupun mereka berkerja, usaha tersebut tidak akan menaikkan tingkat produksi. Sedangkan pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada masa-masa tertentu, yaitu pada bulan-bulan dimana kegiatan pertanian atau kegiatan produksi lainnya lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan masa-masa lainnya (Sadono, 2007)

Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2003).

Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacah dan berusaha memperoleh pekerjaan. Sedangkan orang

yang bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan paling sedikit dua hari dalam seminggu sebelum hari pencacahan dinyatakan sebagai bekerja (Sumarsono, 2003).

2.1.2 Jenis-jenis Pengangguran

Jenis-jenis pengangguran dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan cirinya (Sadono, 2008).

1. Berdasarkan Penyebabnya

- a. Pengangguran Friksional, adalah pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3 persen maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh.
- b. Pengangguran Siklikal, adalah pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.
- c. Pengangguran Struktural, adalah pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan.
- d. Pengangguran Teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri.

2. Berdasarkan Cirinya

- a. Pengangguran musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang menanti musim

tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya.

- b. Pengangguran terbuka, pengangguran yang terjadi karena penambahan lapangan kerja lebih rendah daripada penambahan pencari kerja.
- c. Pengangguran tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.
- d. Setengah menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari) disebut *underemployment*.

2.1.3 Masalah Pengangguran

Pembangunan ekonomi di negara berkembang pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang semakin rumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah, keadaan di negara berkembang dalam beberapa desawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk

Berdasarkan lama waktu kerja, pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok yaitu:

1. Pengangguran terbuka yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibat dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja.
2. Pengangguran tersembunyi yaitu terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.
3. Pengangguran bermusim terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan, yang disebabkan oleh perubahan permintaan terhadap tenaga kerja yang sifatnya berkala. Setengah menganggur (*underemployed*) terjadi bila tenaga kerja tidak bekerja secara *optimum* (kurang dari 35 jam seminggu atau bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dimana produktivitasnya/ pendapatannya rendah (sadono, 2008).

Pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi (Mankiw, 2006)

2.1.4 Dampak Pengangguran

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat adanya pengangguran antara lain :

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian
 - a. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang.
 - b. Pengangguran tidak menggalakan pertumbuhan ekonomi.
 - c. Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah dari pada pendapatan nasional potensial.
2. Dampak pengangguran bagi individu masyarakat
 - a. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
 - b. Pengangguran menyebabkan kehilangan ketrampilan.
 - c. Pengangguran dapat menyebabkan timbulnya penyakit sosial masyarakat (Feriyanto, 2014).

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pertambahan atau perubahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya (Mahyudi, 2004). Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Jhingan, 2007).

Ada tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang penting bagi setiap masyarakat adalah :

1. Akumulasi modal, dimana akumulasi modal termasuk di dalamnya semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja
2. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja
3. Kemajuan teknologi yang secara luas diartikan sebagai cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan (Smith, 2003).

2.2. Upah

2.2.1. Pengertian Upah

Upah/gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah

atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. (BPS., 2013)

Balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dan sebagainya). Masih menurut Gilarso upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (jumlah uang yang diterima) dan upah *riil* (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu (Gilarso., 2003).

Di dalam pasar tenaga kerja dikenal konsep tingkat upah umum. Dalam kenyataannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, perlu mengetahui upah *riil* yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah nominal dibagi oleh biaya hidup. Tingkat upah umum ini yang kemudian diadopsi menjadi tingkat upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang kebijakan (pemerintah). Standar upah buruh harus ada batasan minimumnya. Negara berkembang tidak boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin (Maulana, 2013).

Upah *riil* memang berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, tetapi upah tidak selalu fleksibel. Kadang-kadang upah riil tertahan ditingkat kliring pasar (*market clearing level*) atau tingkat ekuilibrium. Ketika upah *riil* berada di atas tingkat

yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekuatan upah *riil* mengurangi tingkat perolehan kerja dan mempertinggi pengangguran. Pengangguran yang disebabkan oleh kekuatan upah dan penajatan pekerjaan disebut pengangguran struktural. Ketika pemerintah mempertahankan agar upah tidak mencapai tingkat ekuilibrium maka dapat menimbulkan kekakuan upah. Di Indonesia, sistem upah ditetapkan berdasarkan biaya hidup pekerja di setiap daerah (Maulana, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 25 (tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi mengganti UMR menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota Madya (UMK). Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan daerah. Undang-Undang upah minimum menetapkan tingkat upah yang harus dibayar perusahaan kepada karyawannya. Para ekonomi percaya bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar terhadap pengangguran usia muda. Upah ekuilibrium para pekerja di usia muda cenderung rendah karena mereka kurang terdidik atau kurang berpengalaman sehingga cenderung memiliki produktivitas marjinal yang rendah (Maulana, 2013).

Teori upah-efisiensi (*efficiency wage*) mengajukan salah satu penyebab dari kekakuan upah. Teori ini menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat para pekerja lebih produktif. Perusahaan

gagal untuk memangkas upah walaupun terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, karena meskipun akan mengurangi tagihan upah perusahaan, pengurangan upah juga akan memperendah produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Para ekonomi mengajukan empat teori upah-efisiensi untuk menjelaskan bagaimana upah mempengaruhi produktivitas pekerja, yakni;

1. Para pekerja dibayar dengan upah memadai supaya dapat mengkonsumsi lebih banyak nutrisi karena pekerja yang lebih sehat akan lebih produktif. Teori ini tidak terlalu dianggap penting di negara-negara maju karena upah ekuilibrium mereka berada di atas tingkat yang dibutuhkan untuk dapat menjaga kesehatan dengan baik.
2. Semakin besar perusahaan membayar pekerjanya, semakin besar pula insentif mereka untuk tetap bekerja dalam perusahaan tersebut dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan mengurangi frekuensi pekerja yang keluar dari perusahaan dan mengurangi waktu dan dana yang dibutuhkan untuk menarik dan melatih pekerja baru.

Kualitas rata-rata dari tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang mereka terima. jika perusahaan mengurangi upah, maka para pekerja terbaik bisa saja mengambil pekerjaan di tempat lain, meninggalkan perusahaan dengan para pekerja yang memiliki kualitas lebih rendah yang memiliki lebih sedikit alternatif. dengan membayar upah di atas tingkat ekuilibrium, perusahaan bisa

menurunkan seleksi negatif, meningkatkan kualitas rata-rata tenaga kerjanya, dan mampu meningkatkan produktivitas.

Upah yang tinggi akan meningkatkan kinerja pekerja. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memantau dengan sempurna kinerja para pekerja. Para pekerja dapat memilih untuk bekerja keras, atau mereka dapat memilih untuk bermalas-malasan dengan risiko tertangkap basah dan dipecat. Semakin tinggi upah, semakin besar kerugian bagi pekerja apabila mereka dipecat. Dengan membayar upah yang lebih tinggi, perusahaan memotivasi lebih banyak pekerja agar tidak bermalas-malasan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas mereka. Inti dari keempat teori diatas yakni karena perusahaan beroperasi lebih efisien jika membayar pekerjanya dengan upah yang tinggi, maka perusahaan dapat menganggap bahwa mempertahankan upah di atas tingkat ekuilibrium adalah menguntungkan. Hasil dari upah yang tinggi daripada upah ekuilibrium ini adalah tingkat perolehan kerja yang lebih rendah dan pengangguran yang lebih besar (Maulana, 2013).

2.2.2 Sistem Pengupahan di Indonesia

Secara umum sistem upah adalah sebagai berikut :

- a. Upah menurut prestasi (upah potongan) adalah besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan jika hasil kerja bisa diukur secara kuantitatif (dengan

memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai, dan lain-lain).

- b. Upah waktu merupakan besar upah yang ditentukan atas dasar lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong.
- c. Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok kerja. Untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya, yang kemudian dibagi-bagi antara para pelaksana. Misalnya, untuk pembangunan gedung, pembuatan sumur, dan lain-lain.
- d. Upah premi merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi "normal" berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang pekerja mencapai prestasi yang lebih dari itu, pekerja tersebut diberi "Premi". Premi dapat juga diberikan, misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan *time and motion study* (waktu dan studi gerak).
- e. Upah bagi hasil merupakan cara yang biasa di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga, tetapi juga dikenal di luar kalangan

itu. Misalnya, pekerja atau pelaksana diberi bagian dari keuntungan bersih dan direksi sebuah PT mendapat *tantiem* (bagian laba yang diberikan pemegang saham) bahkan kaum buruh dapat diberi saham dalam PT tempat mereka bekerja sehingga kaum buruh ikut menjadi pemilik perusahaan. Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (GPNS) berdasarkan dua prinsip yaitu pendidikan dan masa kerja. Setiap orang yang diangkat sebagai pegawai negeri mendapat gaji pokok yang ditentukan oleh golongan dan masa kerja. Secara empiris besarnya tingkat upah sangat dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu:

1. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) merupakan kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi yang dilihat dari kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan.
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan petunjuk mengenai naik-turunnya harga kebutuhan hidup, peningkatan terhadap harga kebutuhan hidup ini secara tidak langsung dapat mencerminkan tingkat inflasi.
3. Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian dalam suatu daerah yang mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan (Gilarso, 2003).

2.3.Kemiskinan

2.3.1.Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pokok yang ada di Negara sedang berkembang seperti Indonesia yang dapat menghambat proses pembangunan perekonomian. Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Simatupang dan Saktyanu dalam pembangunan (Dermoredjo, 2003) harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan kemiskian sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2004).

2.3.2 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bappenas mempunyai makna yang relatif luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, antara lain adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (5) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat kerja dan berusaha; (6) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (7) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (8) terbatasnya akses terhadap air bersih; (9) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (10) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (11) lemahnya jaminan rasa aman; (12) lemahnya partisipasi; (13) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (14) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat (Bappenas, 2004).

Indikator kemiskinan yang umum digunakan di Indonesia adalah garis kemiskinan (*poverty line*). Badan Pusat Statistik

menentukan batas garis kemiskinan di Indonesia berdasarkan besaran rupiah yang digunakan untuk dibelanjakan per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Indikator menurut BPS adalah:

1. Tidak miskin. adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610,-
2. Hampir tidak miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488,- sampai Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 9.350,- sampai Rp 11.687,- per orang per hari.
3. Hampir miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740,- sampai Rp 280.488,- atau sekitar antara Rp 7.780,- sampai Rp 9.350,- per orang per hari.
4. Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala Rp 233.740,- kebawah atau sekitar Rp 7.780,- kebawah per orang per hari.
5. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya (BPS., 2013).

2.3.3 Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang

berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Menurut BPS (BPS., 2013).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya pangan dan gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan minyak dan lemak dan lain lain. Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.

Kategori kemiskinan menurut BPS dapat dilihat beberapa aspek diantaranya berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m² , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan (Kuncoro, 2004).

Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

2.4 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu di suatu kawasan tidak dapat memenuhi standar

pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di kawasan tersebut. Individu yang hidup dibawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika perkonomian berkembang disuatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik di antara penduduk kawasan tersebut akan mengurangi kemiskinan. Artinya secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memiliki peranan penting dalam mengatasi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun Syarat kecukupan (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk digolongan penduduk miskin (*growth with equity*.) Secara langsung hal ini berarti pertumbuhan itu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana orang miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal ini berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan di sektor modren seperti jasa dan manufaktur yang padat modal (Siregar, 2009).

Selanjutnya menurut Kuznets pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap terakhir pembangunan, jumlah

penduduk miskin berangsur-angsur berkurang. Disamping itu sudah cukup banyak studi empiris dengan pendekatan lintas negara yang menguji korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan hasilnya menunjukkan bahwa memang ada suatu korelasi yang kuat antara kedua variabel ekonomi makro tersebut. Juga cukup banyak yang mencoba membuktikan adanya pengaruh dari pertumbuhan *output* sektoral terhadap pengurangan jumlah orang miskin. Dengan kata lain kemiskinan tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan *output agregat* atau PDB/PN, tetapi juga pertumbuhan *output* sektor-sektor ekonomi secara individu (Tambunan, 2001)

2.5 Hubungan Upah Minimum Dengan Tingkat Kemiskinan

Tujuan utama ditetapkan upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikan produktifitas perusahaan dan

kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum (Prastyo, 2010).

2.6 Hubungan Pengangguran Dengan Tingkat Kemiskinan

Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

2.7. Penelitian Terkait

Penelitian mengenai pengangguran terbuka dan upah minimum bukan sebuah penelitian yang baru, banyak peneliti-peneliti terdahulu yang telah meneliti, pengaruh, dan menganalisis mengenai terhadap kemiskinan di Provinsi. Penelitian-penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terkait

No	Penelitian dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara</p> <p>Oleh: Rizky Yulita Sutikno , Debby Ch. Rotinsulu dan Steeva Y. L. Tumangkeng (2019).</p>	<p>Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini: Uji Koefisien Determinasi Berdasarkan hasil estimasi di dapat nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.341 yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu upah minimum dan investasi pemerintah mempengaruhi 0.341% dan sisanya 0,669 % di pengaruhi oleh variabel di luar variabel upah dan investasi.</p>	<p>Pesamaan variabel ini adalah upah minimum (X) dan kemiskinan (Y).</p>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah variabel Investasi (X_2) dan lokasi penelitian.</p>

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010-2015) Oleh: Dita Sekar Ayu (2018).	Metodel analisis regresi linier berganda dengan menggunakan <i>Sofrware Statistical Product and Service Solutions (SPSS)</i> .	Berdasarkan hasil penelitian ini : Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, variabel TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin, Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.	Pesamaan variabel ini adalah tingkat pengangguran (X2), variabel Upah Minimum (X5) dan variable Kemiskinan (Y).	Perbedaan penelitian adalah Produk Domestik Regional Bruto (X1), IPM (X3), Jumlah Penduduk (X4) dan lokasi penelitian .

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Oleh: Bhowi Dewananda (2018).	Penelitian ini menggunakan metode <i>ordinary least square</i> (OLS).	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel Upah Minimum berpengaruh signifikan dan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Nilai adjusted R2 sebesar 0,882525, hal ini berarti sebesar 88,25% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen.	Pesamaan variabel ini adalah Upah Minimum (X1), Pengangguran (X3), dan variable Kemiskinan (Y).	Perbedaan penelitian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2), dan lokasi penelitian ..

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2015 Oleh: Iqbal Banyu Sunarya dan Dini Indrawati (2018).	Model yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model penelitian sebelumnya dengan menggunakan <i>Panel Data Regression Model</i> .	PDRB per kapita memiliki hubungan negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, Pendidikan yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah memiliki hubungan negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, Kesehatan yang diukur dengan Angka Harapan Hidup memiliki hubungan yang negatif dan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat kemiskinan, Pengangguran terbuka memiliki hubungan yang negatif terhadap Tingkat Kemiskinan dan Upah Minimum memiliki hubungan yang negatif dan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.	Pesamaan variabel ini adalah Upah Minimum (X3), pengangguran (X4), upah minimum (X5) variabel dan variable Kemiskinan (Y).	Perbedaan penelitian adalah PDRB Per kapita (X1), Pendidikan (X2), Kesehatan (X3) dan lokasi penelitian .

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5	Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Oleh: Dra. Diah Retnowati, M.Si, Harsuti, S.E., M.Si (2017).	Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program <i>SPSS for Windows versi 17.0.</i>	Berdasarkan hasil penelitian ini: Pengangguran regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran bertanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Pertumbuhan Ekonomi Regional bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi Regional bertanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Inflasi dari hasil regresi menunjukkan dari Inflasi 0,358 dan signifikan secara statistik.	Pesamaan variabel ini adalah variabel pengangguran (X1) dan variabel tingkat kemiskinan (Y).	Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara Oleh : Alfi Amalia, M.E.I (2017).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dan Teknik pengumpulan data, yaitu melakukan pencatatan langsung dengan data berupa time series yaitu dari tahun 2010-2013.	Hasil penelitian menunjukkan nilai F-statistik 36,147 dan nilai probabilitas 0,000000 yang menyatakan bahwa Tingkat Pendidikan, Pengangguran dan Ketimpangan gender bersama-sama mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Utara. Dan variabel Pendidikan dan ketidaksetaraan gender berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan sedangkan variabel pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.	Pesamaan variabel ini adalah tingkat pengangguran (X2) dan variabel kemiskinan (Y).	Perbedaan penelitian adalah Pendidikan (X1), Ketimpangan Gender (X3) dan lokasi penelitian .

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
7	Analisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015 Oleh: Shinta Setya Ningrum (2017).	Penelitian ini menggunakan model data panel dan menggunakan <i>views</i> ⁹	Hasil penelitian menunjukkan Hasil regresi yaitu nilai <i>Adjusted R-Square</i> sebesar 0,993546 yang artinya 99,35 persen variasi jumlah penduduk miskin (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model statistik yaitu TPT, IPM, dan upah minimum. Sedangkan 0,65 persen variasi dari jumlah penduduk miskin (Y) dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model.	Pesamaan variabel ini adalah tingkat pengangguran (X1), variabel Upah Minimum (X3) dan variable Kemiskinan (Y).	Perbedaan penelitian adalah Indeks Pembangunan Manusia (X2), dan lokasi penelitian .
8	Pengaruh Upah dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Makassar Oleh: Syahrina Syam HS (2016).	Metode analisis regresi linear berganda.	Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa upah dan pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.	Persamaan variabel Upah (X1) dan variabel Tingkat Tengganguran (Y).	Perbedaan variabel ini adalah variabel Pertumbuhan Penduduk (X2) dan lokasi penelitian .

Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9	Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Aceh 2005 - 2015. Oleh: Fitriani (2016).	Metodel analisis regresi linier berganda dengan menggunakan <i>Software Statistical Product and Service Solutions (SPSS)</i> .	Hasil penelitian ini variabel Upah Minimum Provinsi (X1) berpengaruh nyata terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh, Pengangguran berpengaruh nyata terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, dan Upah Minimum Provinsi dan Pengangguran secara bersama-sama (serempak) berpengaruh nyata terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2005-2015.	Pesamaan variabel ini adalah Upah Minimum (X1), Tingkat Pengangguran (X2), dan Jumlah Penduduk Miskin (Y).	Perbedaan penelitian adalah data tahun 2005 - 2015.

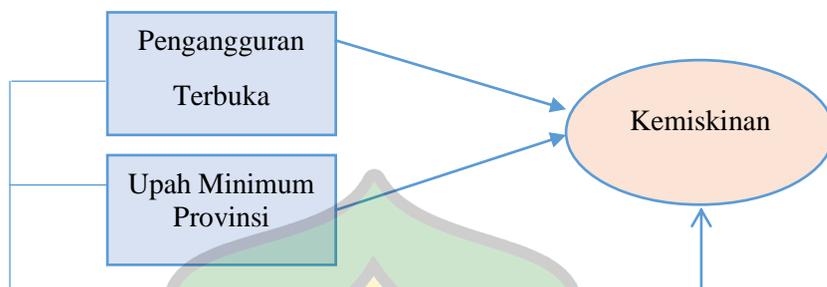
Lanjutan Tabel 2.1

No	Penelitian dan judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10	Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau Oleh: Vinny Alvionita, Riva Hainim dan Kadir Deny Setiawan (2014).	Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program <i>SPSS for Windows</i> versi 17.0.	Ada hubungan yang positif antara Jumlah Pengangguran Terbuka dan Upah minimum Provinsi secara bersama-sama mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau.	Pesamaan variabel ini adalah Upah Minimum (X_1), Tingkat Pengangguran (X_2), dan Jumlah Penduduk Miskin (Y).	Perbedaan penelitian adalah data tahun 2005 - 2015.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. pemikiran dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: (Fitriani, 2016), (Ayu, 2018)

Dari kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa faktor pengangguran terbuka merupakan salah satu penyebab kemiskinan bagi masyarakat, apabila suatu masyarakat ada yang sudah bekerja tetapi ada juga yang belum mendapatkan pekerjaan hal ini bisa meningkatkan kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindakan kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005).

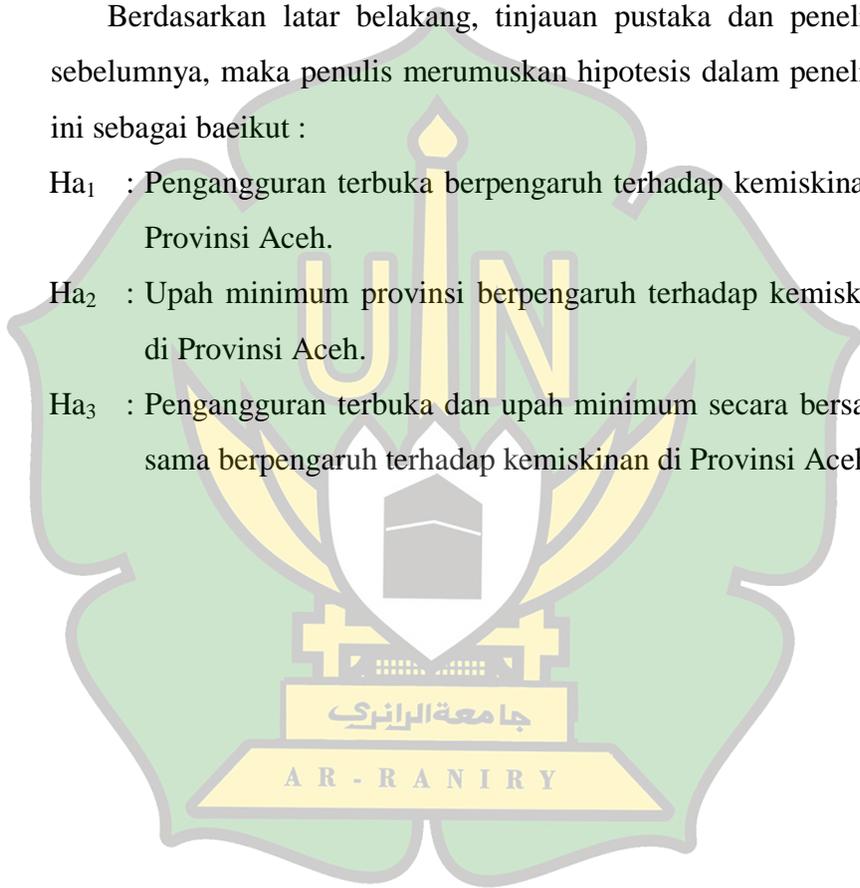
Upah minimum digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehingga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Upah minimum merupakan hasil dari pendapatan yang diterima setelah bekerja dengan adanya kenaikan tingkat upah minimum akan meningkatkan pula pendapatan yang diperoleh

masyarakat supaya kebutuhan sehari-hari tercukupi serta terhindar dari kemiskinan (Ayu, 2018).

2.9. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Ha₁ : Pengangguran terbuka berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
- Ha₂ : Upah minimum provinsi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
- Ha₃ : Pengangguran terbuka dan upah minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai seberapa besar dan bagaimana hubungan antara Pengangguran Terbuka, Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi, pengangguran terbuka, upah minimum dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada kurun waktu 2009-2019. penelitian ini menggunakan rumusan masalah deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (sugiyono, 2009).

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (sugiyono, 2009). Data sekunder diperoleh dari data yang telah dipublish oleh pemerintah atau pihak tertentu. Data sekunder berupa data pengangguran terbuka, upah

minimum dan kemiskinan di Provinsi Aceh yang diperoleh website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) tahun 2009-2019.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara membaca buku-buku referensi, skripsi serta browsing website internet yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi (*Documentation Research*)

Pada metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data meliputi pengangguran terbuka, upah minimum Provinsi Aceh, dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh kemudian data tersebut dijadikan sebagai input dalam penelitian.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2009).

Dalam penelitian ini definisi operasional dari masing masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengangguran Terbuka (X_1) adalah semua angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum menemukan pekerjaan di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2009-2019 yang diukur dalam ribu jiwa.
- b. Upah Minimum Provinsi (X_2) adalah besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2009-2019 yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).
- c. Kemiskinan (Y) adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2009-2019 yang diukur dalam persen (%).

3.4.1 Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2009-2019 dengan mengoperasikan 3 variabel. Kemiskinan (Y) menjadi variabel terikat (*dependent variable*) yang dipengaruhi oleh 2 variabel bebas (*independent variable*) merupakan pengangguran terbuka (X_1) dan upah minimum (X_2). Dalam penelitian ini perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS *for Windows* versi 16.0.

Model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + X1 + X2 + e$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan (variabel terikat)

a = Konstanta

X1 = Pengangguran Terbuka

X2 = Upah minimum Provinsi

e = *error term*

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Mengingat data penelitian yang digunakan adalah sekunder, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji F maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan yaitu normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal *Invalid source specified* (Singih, 2010).

Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah:

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan

distribusi normal, maka model regresi memenuhi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, jika menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Pengujian normalitas data menggunakan *Test of Normality Kolmogorov-Smirnov* dalam program SPSS. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymptotic Significance*), yaitu:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinearitas* digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem multikolinieritas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terbukti ada *multikolinieritas*, sebaiknya salah satu independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih, 2010). Untuk mendeteksi ada tidaknya *multikolinieritas* dapat dilihat dari besaran *Variance Inflation*

Factor (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas *multikolinieritas* adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala *multikolinieritas*.

3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *varian* atau *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Singgih untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-*rank Spearman* yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut dari residual (*error*). Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas, maka dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas kemudian menentukan nilai *absolut residual*, selanjutnya meeresisikan nilai *absolute residual* diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (*varian* dari *residual* tidak *homogen*) (Singgih, 2010)..

Untuk melihat hasil dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini merujuk pada uji *glejser*, dengan syarat nilai signifikansinya harus lebih besar dari 0,05.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan analisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time series*. Uji autokorelasi yang dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Singgih, 2010). Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran *Durbin-Watson*. Untuk memeriksa ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan uji *Durbin-Watson* dengan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika $(D-W) < dL$, maka H_0 ditolak
- b. Jika $(D-W) > dU$, maka H_0 diterima
- c. Jika $dL < (D-W) < dU$, maka tidak dapat diambil kesimpulan

Keterangan:

$D-W = \text{Durbin-Watson}$

$dL = \text{Durbin Lower}$

$dU = \text{Durbin Upper}$

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Uji Secara Parsial (Uji t) dan Signifikansi

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel

tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan (Hasan, 2013). hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan signifikan 0,05. Kriteria yang digunakan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah sebagai berikut:

- a. Diterima jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap Variabel terikat (Y)
- b. Ditolak jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap Variabel terikat (Y)

Rancangan pengujian hipotesis statistik ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independent (X) yaitu pengangguran terbuka (X1) dan upah minimum (X2), terhadap kemiskinan (Y), adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- a. Hipotesis ditolak jika nilai signifikansi (Sig) < probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)
- b. Hipotesis diterima jika nilai signifikansi (Sig) > probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

3.4.3.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara

bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan secara simultan (Sugiyono, 2009). Dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
- b. Ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

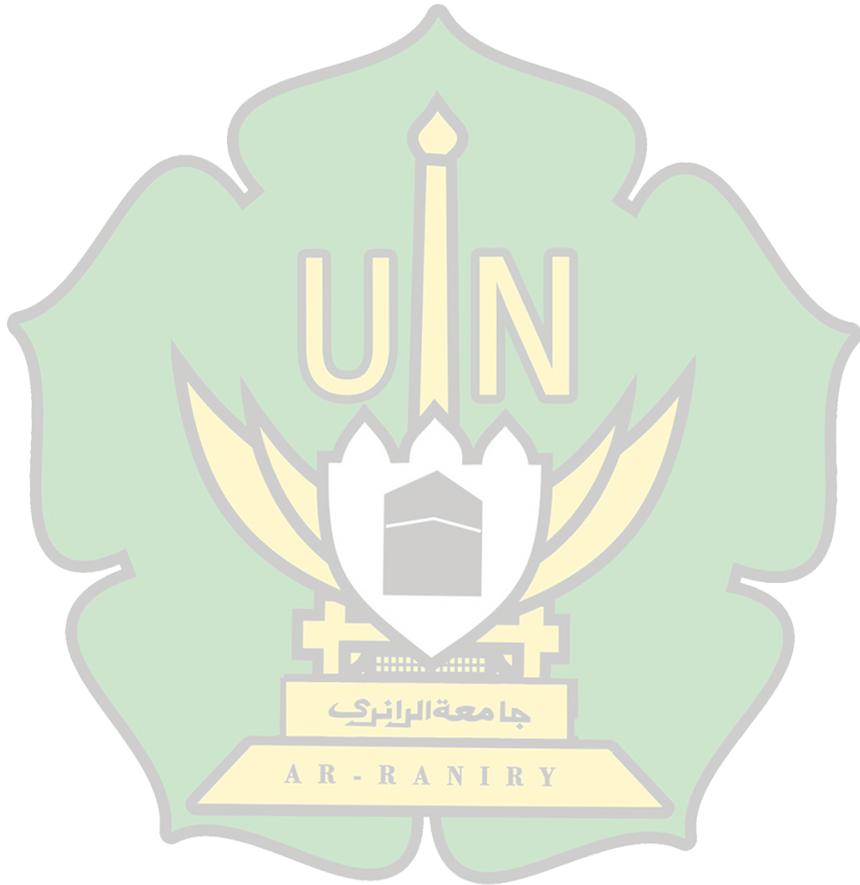
3.4.4 Analisis Korelasi (R)

Menurut Supranto koefisien korelasi adalah suatu analisa untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan variabel lainnya, dan dinyatakan dalam lambang R. Dalam analisis korelasi yang dicari adalah koefisien korelasi yaitu angka yang menyatakan derajat hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Supranto, 2004).

3.4.5 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut koefisien determinasi atau koefisien penentu adalah untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel (X) terhadap variabel (Y) yang dinyatakan dalam persen.. Untuk menganalisis hubungan antara variabel penelitian juga digunakan analisis formulasi korelasi dan determinasi. Korelasi (R) positif kuat apabila hasil korelasi mendekati 1 atau sama dengan 1. Korelasi negatif kuat apabila hasil korelasi mendekati -1 atau sama dengan

-1. Tidak ada korelasi apabila hasil korelasi mendekati 0 atau sama dengan 0 (Supranto, 2004).



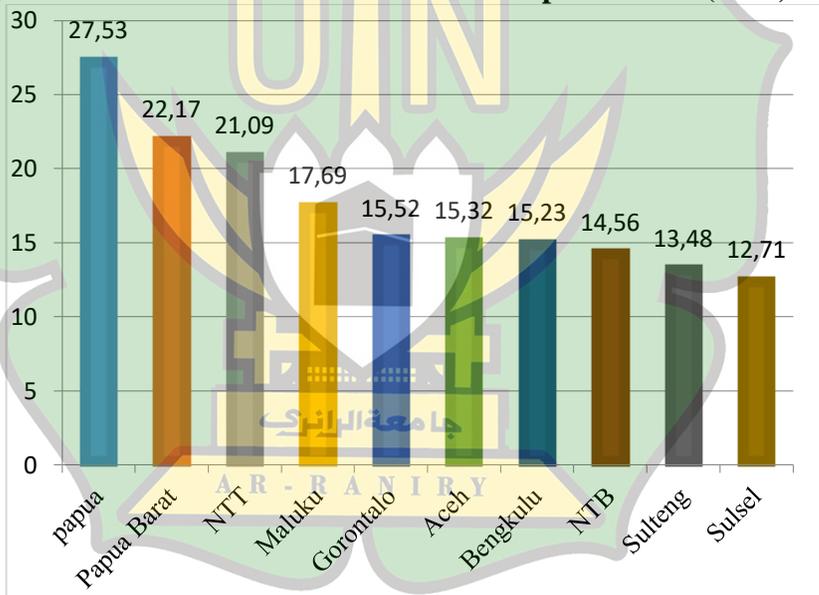
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian

4.1.1 Kemiskinan Provinsi Aceh

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu.

Gambar 4.1
Penduduk Miskin di Indonesia pada tahun (2019)

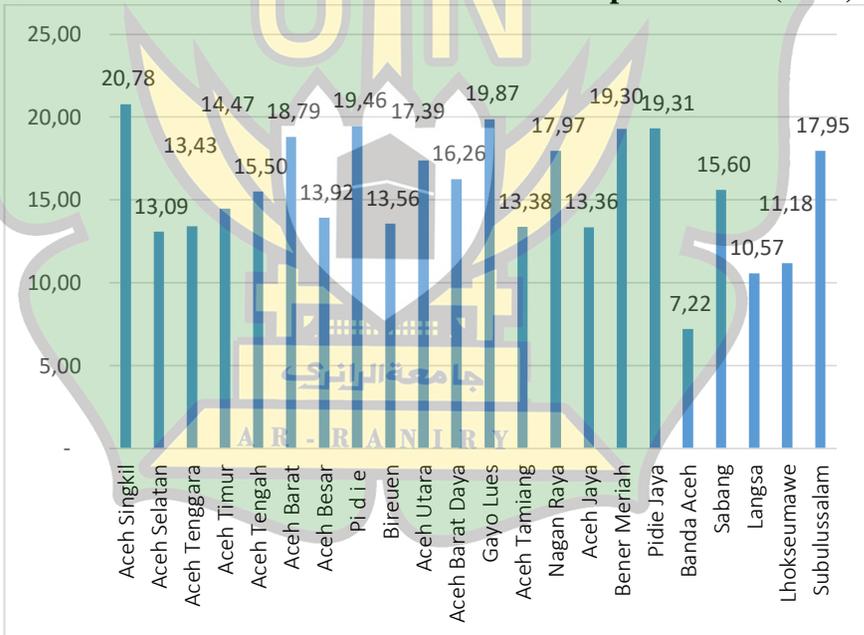


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (data diolah)

Pada Gambar 4.1 memperlihatkan 10 Provinsi persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019, di Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki persentase penduduk

miskin terbanyak nomor enam di level nasional sebelum Provinsi Bengkulu, padahal APBD Aceh berada di rangking nomor tiga terbanyak dibandingkan dengan 34 provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Rata-rata persentase penduduk miskin Indonesia mencapai angka 9,22 persen jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin di provinsi Aceh yang mencapai 15,32 persen. Bahkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh masih bertahan sebagai Provinsi no satu termiskin ditingkat Sumatera.

Gambar 4.2
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh pada tahun (2019)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (data diolah)

Kalau dilihat pada Gambar 4.2 tingkat penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh, jelas terlihat bahwa pada tahun

2019 persentase penduduk miskin yang tertinggi berada di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu 20,78 persen, dan yang terendah berada di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota provinsi Aceh, yaitu 7,22 persen. Beberapa Kabupaten yang tinggi angka penduduk miskin di Provinsi Aceh memiliki pekerjaannya adalah petani dan nelayan, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses perkembangan ekonomi jauh dari program-program pembangunan (yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga internasional). Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan agar terhindar kehidupan dalam kemiskinan.

4.1.2 Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran di Aceh per tahun 2019 dilaporkan mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyebutkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh tahun 2019 mencapai 6.20 persen, sedangkan di tahun 2018 sebesar 6.35 persen. Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan lapangan kerja Aceh kian meningkat. Tahun 2017 angka pengangguran di Aceh mencapai 6,57 persen kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 6.35 persen dan tahun 2019 turun menjadi 6,20 persen. Ada beberapa sektor yang serapan tenaga kerjanya banyak sehingga membuat pengangguran di Aceh Aceh berkurang. Di antaranya adalah sektor pertanian dan perkebunan dengan serapan tenaga kerja sebanyak 36.49 persen dengan jumlah 810 ribu

pekerja. Di posisi kedua adalah sektor perdagangan yaitu mencapai 35.74 persen dengan jumlah 349 ribu pekerja. Untuk sektor pengolahan sebesar 8.20 persen (187 ribu pekerja), jasa pendidikan 7.60 persen (183 ribu pekerja). Sedangkan di sektor pengadaan listrik, gas air pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, menjadi sektor terendah penyerapan tenaga kerja hanya menyerap 0.42 persen saja dengan jumlah pekerja hanya 11 ribu. Perkembangan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh tahun 2009-2019.

Tabel 4.1
Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh Tahun 2009-2019

No	Tahun	Jumlah Pengangguran (terbuka) (ribu)	Persentase Pengangguran Terbuka (%)
1	2009	1.898	8,71
2	2010	1.939	8,37
3	2011	2.001	7,43
4	2012	2.088	9,1
5	2013	2.122	10,3
6	2014	2.123	9,02
7	2015	2.183	9,93
8	2016	2.258	7,57
9	2017	2.289	6,57
10	2018	2.353	6,35
11	2019	2.366	6,20

Sumber: BPS, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh (2020).

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase pengangguran terbuka paling tinggi adalah pada tahun 2013 yaitu 10,3%. Penurunan pekerja paling besar terjadi pada sektor konstruksi, yaitu menurun sebesar 24 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan

Agustus 2012. Sedangkan untuk sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, mengalami peningkatan sebesar 28 ribu orang. Proyek-proyek pekerjaan pembangunan yang tidak terselesaikan sangat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Apalagi di Provinsi Aceh kebanyakan masyarakat kita bekerja di sektor tersebut, sehingga pada tahun ini jumlahnya menurun (www.tribunnews.com, 2013).

4.1.3 Upah Minimum

Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota disuatu provinsi. UMP merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usaha atau kerjanya. Disebut UMP karena pemenuhan kebutuhan yang layak disetiap provinsi berbeda-beda. Sebelumnya, istilah yang digunakan yaitu Upah Minimum Regional atau disingkat dengan UMR. Perubahan tersebut berkaitan dengan pergeseran peran dan wewenang menetapkan upah minimum sejalan dengan penerapan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Bila sebelumnya gubernur hanya mengajukan rekomendasi kepada Menteri Tenaga Kerja yang membuat keputusan final, maka semenjak tahun 2001 keputusan UMP dan UMK untuk tiap provinsi dan kabupaten atau kota madiya langsung dibuat oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari masing-masing bupati atau walikota di Provinsi.

Tujuan utama dari ditetapkannya UMP yaitu sebagai “jaring pengaman” yang berfungsi untuk mencegah agar upah tidak terus merosok dibawah daya beli pekerja. Adapun tujuan UMP/UMK terus dinaikkan adalah; pertama, untuk mengurangi kesenjangan antara upah tertinggi dan terendah yang dibayar oleh perusahaan. Kedua, kenaikan UMP diharapkan dapat meningkatkan penghasilan pekerja pada jabatan yang terendah dalam perusahaan. Ketiga, dari aspek makro, diharapkan dapat membantu mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan ekonomi rakyat.

Tabel 4.2
Jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Aceh (2009-2019)
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Upah Minimum Provinsi (Rp)	Pertumbuhan (persen)
2009	1.300.000	-
2010	1.350.000	3,85
2011	1.380.000	2,22
2012	1.400.000	1,45
2013	1.550.000	10,71
2014	1.750.000	12,90
2015	1.900.000	8,57
2016	2.118.000	11,5
2017	2.500.000	8,25
2018	2.700.000	8,71
2019	2.916.810	8,03

Sumber: BPS, Jumlah Upah Minimum Provinsi Aceh (2020).

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah Upah Minimum Provinsi Aceh tertinggi adalah tahun 2019 yaitu sebesar RP. 2.916.810 dan yang terendah adalah tahun 2009 yaitu Rp. 1.300.000. Pemerintah Aceh kembali menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2020 sebesar RP. 248.221. Jumlah itu naik dari UMP tahun lalu yaitu RP. 2.916.810, menjadi RP. 3.165.031. Keputusan naiknya UMP Aceh itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019 tanggal 1 November 2019 (Humas, 2019).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Normalitas

Asumsi klasik yang pertama diuji adalah normalitas. Pengujian normalitas dengan memakai uji *Kolmogorov-smirnov* (KZ) dengan tingkat signifikansi 0,05. Pada tabel berikut ini dapat dilihat pengujian terhadap variabel-variabel yang diteliti menunjukkan bahwa nilai signifikan masing-masing variabel diatas 0,05. Hal tersebut menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai distribusi normal.

Tabel 4.1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36286009
Most Extreme Differences	Absolute	.148
	Positive	.097
	Negative	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		.492
Asymp. Sig. (2-tailed)		.969

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,969 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan asumsi atau persyaratan normalitas model reresi sudah terpenuhi.

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas, maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan

nilai *variance inflation factor* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas Data

Variabel	Tolerance	Nilai <i>variance inflation factor</i> (VIF)
Pengangguran terbuka (X_1)	.114	8.782
Upah Minimum (X_2)	.114	8.782

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada Tabel 4.2 di atas pengangguran terbuka sebesar 8.782 persen dan upah minimum sebesar 8.782 persen menunjukkan nilai VIF dari semua variabel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas antara kedua variabel bebas yang diteliti.

4.2.1.3 Uji Heterokedastisitas

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan seperti tampak pada Gambar 4.3 pada uji *glejser*: جامعة

AR - R A N I R Y

Gambar 4.3
Uji Glejser
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.117	2	.059	1.920	.208 ^a
Residual	.245	8	.031		
Total	.362	10			

Berdasarkan Gambar 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,208 lebih besar dari 0,05 artinya data dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.2.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan analisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time series*. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besaran *Durbin-Waston*. Untuk memeriksa ada tidaknya autokorelasi, maka dilakukan uji *Durbin-Watson* dengan keputusan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil uji Durbin-Watson

dU	dL	Durbin-Watson
0,7580	1,6044	1.092

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan kriteria nilai dU $(0,7580) < D-W(1.092) < dL (1,6044)$ sehingga dapat disimpulkan tidak ada terjadi autokolerasi.

4.2.2 Hasil Analisis Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2009-2019 digunakan perangkat regresi linear berganda dengan mengoperasikan 3 variabel. Kemiskinan (Y) menjadi variabel terikat (*dependent variable*) yang dipengaruhi oleh 2 variabel bebas (*independent variable*) merupakan pengangguran terbuka (X_1) dan upah minimum (X_2).

Bila pengangguran terbuka naik 1 jiwa, maka akan menyebabkan menurunnya kemiskinan yaitu sebesar 1,98 dengan variabel lainnya konstan.

$$Y = 56.266 - 1,980X_1 + 2.26X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kemiskinan

X_1 = Pengangguran Terbuka

X_2 = Upah Minimum Provinsi

e = *error term*

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dengan menganggap variabel lainnya konstan. Syarat suatu variabel bebas dikatakan berpengaruh signifikan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansinya $< 0,05$. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Uji t

Nama Variabel	t hitung	t tabel	Sig.
Konstanta (a)	14.176	2,306	.000
Pengangguran terbuka (X_1)	8.325		.000
Upah minimum (X_2)	3.470		.008

Pada tabel 4.4 diatas menjelaskan pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial adalah:

- Hasil penelitian terhadap variabel pengangguran terbuka (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} 8.325 sedangkan t_{tabel} 2,306, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas jauh dibawah 0,05. Dengan demikian hasil perhitungan statistik

menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengangguran terbuka (X_1) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y).

- b. Hasil penelitian terhadap variabel upah minimum (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3.470 sedangkan $t_{tabel} = 2,306$ hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 atau probabilitas jauh dibawah 0,05. Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2009-2019.

4.2.3.2 Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan) tingkat signifikansi 0,05. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel dependen berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel independen. Sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan, maka dapat dijelaskan pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Analisis Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.
Regresi	38.971	2	19.485	118.391	3,18	.000
Sisa	1.317	8	.165			
Total	40.287	10				

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 118.391, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 3,18. Hal ini memperlihatkan, berdasarkan perhitungan uji statistik F_{hitung} menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian hasil perhitungan ini dapat di ambil suatu keputusan bahwa hipotesis alternatif yang diajukan dapat diterima dan hipotesis H_0 ditolak, artinya bahwa tingkat pengangguran terbuka (X_1), dan upah minimum (X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2009-2019.

4.3 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Untuk menganalisis hubungan antara variabel penelitian juga digunakan analisis formulasi korelasi dan determinasi. Korelasi (R) positif kuat apabila hasil korelasi mendekati 1 atau sama dengan 1. Korelasi negatif kuat apabila hasil korelasi mendekati -1 atau sama dengan -1. Tidak ada korelasi apabila hasil korelasi mendekati 0 atau sama dengan 0. Sementara korelasi

determinasi (R^2) menjelaskan sejauhmana kontribusi hubungan satu variabel dengan variabel lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Koefisien Kolerasi dan Diterminasi

R	R _{Square}	Adjusted R ²	Std. Error of the estimate
.984 ^a	.967	.959	.40569

Koefisien korelasi (R) = 0,984 yang menunjukkan variabel pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi berpengaruh sangat kuat terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Koefisien determinasi (R_{square}) sebesar 0,967 artinya variabel pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi dapat menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 97% dan selebihnya sebesar 3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian dengan asumsi *ceteris paribus*.

4.4 Pengaruh Pengangguran Terbuka dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Hasil penelitian terhadap variabel pengangguran terbuka (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} 8.325 sedangkan t_{tabel} 2,306, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas jauh dibawah 0,05. Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengangguran terbuka (X_1) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y). Nilai negatif menunjukkan hubungan yang

berbanding terbalik antara variabel pengangguran terbuka dengan kemiskinan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan di Provinsi Bali yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh dominan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2011-2016 dibandingkan kesempatan kerja, dan tingkat pendidikan, dengan kontribusi sebesar 64,32 (Putra, 2018).

Berbeda dengan hasil penelitian ini sementara tidak semua orang yang menganggur selalu miskin. Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari yang ditentukan. Selain itu pastilah juga ada yang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai

pekerjaan paruh waktu (*part time*) namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka (Okta , 2013).

Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadang kala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin (Lincolind, 2005).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Jawa Timur Hasil pengujian model *fixed effect* ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar -1.093912, yang menyimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan karena tidak semua orang yang menganggur itu selalu miskin (Ayu, 2018).

Namun Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2009-2019. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian ini yang menyimpulkan bahwa Variabel upah minimum memiliki hubungan yang negatif dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan sebesar -2.744. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi upah minimum akan mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi upah minimum dapat memicu penurunan tingkat kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Penetapan upah minimum yang mendekati KHM (Kebutuhan Hidup Minimum) dan diatas garis kemiskinan telah tepat karena mampu menurunkan tingkat kemiskinan (Indrawati, 2018).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil penelitian terhadap variabel pengangguran terbuka (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} 8.325 sedangkan t_{tabel} 2,306, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau probabilitas jauh dibawah 0,05. Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengangguran terbuka (X_1) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y) sebesar 1,98 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
2. Hasil penelitian terhadap variabel upah minimum (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3.470 sedangkan $t_{tabel} = 2,306$ hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 atau probabilitas jauh dibawah 0,05. Dengan demikian hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sebesar 2,25 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 118.391, sedangkan F_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 3,18. Hal ini memperlihatkan, berdasarkan perhitungan uji statistik F_{hitung} menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian hasil perhitungan ini dapat di ambil suatu keputusan bahwa hipotesis

alternatif yang diajukan dapat diterima dan hipotesis H_0 ditolak, artinya bahwa tingkat pengangguran terbuka (X_1), dan upah minimum (X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2009-2019.

5.2 Saran

Saran penulis mengenai penelitian pengaruh pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh didasarkan kepada kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat mengeluarkan kebijakan yang mendorong peningkatan pembukaan lapangan kerja baru mengurangi pengangguran terbuka dan menstabilkan kondisi perekonomian untuk menekan kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Kepada seluruh pengusaha agar dapat membayar upah pekerja dengan mengikuti pada standar upah minimum yang telah ditetapkan. Sehingga pekerja terhindar dari garis kemiskinan dan pendapatan diperoleh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Amalia (2017). *Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara*, Jurnal At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2 No, 2, Jakarta
- Ayu, D. S. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur . *Jurnal Ekonomi Bisnis*.
- Bappenas, B. P. (2004). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Bappenas: Jakarta.
- Basri, F. d. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bhowi Dewananda (2018). *Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Jakarta
- BPS. (2019). *Keadaan Ketenagakerjaan 2020*.
- BPS. (2019). *Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dan rata-rata Nasional per tahun (Dalam Rupiah)*. BPS - Statistics Indonesia: <https://www.bps.go.id/>.
- BPS. (2013). *BPS - Statistics Indonesia*. Jakarta: bps.go.id.
- Dita Sekar Ayu, (2018). *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010-2015)*. Jurnal Ekonomi, Jakarta

- Diah Retnowati, M.Si, Harsuti, S.E., M.Si (2017). *Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Jakarta
- Dermoredjo, P. S. (2003). *Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Hal. 191 - 324, Vol. 51.
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fitriani. (2016). *Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh 2005-2015*.
- Gilarso. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini, U. e. (2006). *Pengantar Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Humas. (2019). *Pemerintah Aceh Naikkan Upah Minimum 2020*. Banda Aceh: humas.acehprov.go.id.
- Indrawati, D. S. (2018). *Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita, Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015*. repository.unpad.ac.id.
- Jhingan, M. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Edisi Keenambelas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lincolind, A. (2005). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi pertama*. Yogyakarta: BPFE.

- Mahyudi, A. (2004). *Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mankiw, N. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro. Edisi -3*. Jakarta: Selemba Empat.
- Maulana, H. (2013). *Evaluasi Kinerja Ekonomi Aceh*. <http://www.acamedia.edu> (diakses Juni 2014): <http://www.acamedia.edu> (diakses Juni 2014).
- Okta, R. Y. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011*.
- Putra. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7[3]: 416-444 ISSN: 2303-0178 416
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
- Prastyo. (2010). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (studi kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007) Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rizky Yulita Sutikno, -Debby ChR Rotinsulu dan Steeva Y. L. Tumangkeng (2019). *Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara*, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Vo. 19 No.01
- Riva, H. K. (2014). Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. *jurnal J O M F E K O N V o l . 1 N o , 2*.
- Sadono.S (2008). *Makroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Singgih, s. (2010). *Statistik Nonparatrik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Siregar, H. (2009). *Makro-mikro Pembangunan*. IPB Pres. Kampus IPB Dermaga Bogor: indonesia.
- Shinta Setya Ningrum (2017). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2011-2015*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 15, No. 2, Jakarta
- Smith, T. d. (2003). *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga. Edisi Sembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Syahrina Syam HS (2016). *Pengaruh Upah Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Makassar*, Jurnal Iqtisaduna, Vol 1 No 1, Jakarta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sadono, S. (2007). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, Dan Dasar Daan Dasar Kebijakan. Edisi Kedua. Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Sukirno, s. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. jakarta: Prenada Media Group.
- Sumarsono. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusiadan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunarya, D. I. (2018). Analisis Pengaruh PDRB per Kapita, Pendidikan, Kesehatan, Pengangguran,.
<http://www.feb.unpad.ac.id/>.Suryawati. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*.
- Supranto, J. (2004). *Statistik. Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.

Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tribun, n. (2013). *Pengangguran di Aceh Meningkat 32.000 Orang*. Banda Aceh: m.tribunnews.com.

Yacoub. (2017). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*. Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 176 - 185

Vinny Alvionita, Riva Hainim dan Kadir Deny Setiawan (2014). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Riau*, *Jurnal Online Mahasiswa fakultas Ekonomi* Vol 1 No. 2

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.



DATA PENELITIAN

Tahun	Kemiskinan (%)	Pegangguran Terbuka (ribu jiwa)	Upah Minimum Provinsi (RP)
2009	21.8	1.898	1300000
2010	20.98	1.939	1350000
2011	19.57	2.001	1380000
2012	17.6	2.088	1400000
2013	17.6	2.122	1550000
2014	18.05	2.123	1750000
2015	17.8	2.183	1900000
2016	16.73	2.258	2118000
2017	16.89	2.289	2500000
2018	15.97	2.353	2700000
2019	15.32	2.366	2916810

```

SAVE OUTFILE='D:\Haris\hasil spss\data biasa kemiskinan% , T
P dan UMP\hasil bersama rupiah '+
'ditambah 000.sav'
/COMPRESSED.
REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS CI BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE Z
PP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT kemiskinan
/METHOD=ENTER PT UMP
/SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID)
/CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3)

/SAVE RESID.
    
```

Regression

[DataSet0]

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.984 ^a	.967	.959	.40569	1.092

a. Predictors: (Constant), UMP, PT

b. Dependent Variable: kemiskinan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38.971	2	19.485	118.391	.000 ^a
	Residual	1.317	8	.165		
	Total	40.287	10			

a. Predictors: (Constant), UMP, PT

b. Dependent Variable: kemiskinan

AR - R Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	56.266	3.969		14.176	.000		
PT	-1.980E-5	.000	-1.577	-8.325	.000	.114	8.782
UMP	2.259E-6	.000	.657	3.470	.008	.114	8.782

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	56.266	3.969		14.176	.000		
PT	-1.980E-5	.000	-1.577	-8.325	.000	.114	8.782
UMP	2.259E-6	.000	.657	3.470	.008	.114	8.782

a. Dependent Variable: kemiskinan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36286009
Most Extreme Differences	Absolute	.148
	Positive	.097
	Negative	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		.492
Asymp. Sig. (2-tailed)		.969

a. Test distribution is Normal.